BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia dilindungi menurut ketentuan konstitusi. Pengaturan komunitas *sosio religious* yang hidup dengan mengutamakan harmonisasi tersebut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusi telah mengatur secara tertulis berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang dapat diartikan telah mendapat pengakuan dari norma dasar yaitu Pasal 18B Ayat (2) "Ketentuan tersebut berarti konstitusi mengakui bahwa desa adat mempunyai kemampuan hukum untuk mempertahankan hak-hak tradisionalnya di depan pengadilan. Kemampuan hukum untuk mempertahankan hak tradisional itu bukan hanya terhadap perbuatan orang-orang perorangan tetapi juga terhadap perbuatan Negara.

Regulasi yang terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang perkembangannya antara lain yaitu, Berdasar pengaturann Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang otonomi pemerintahan desa diantaranya ditempatkannya prakarsa masyarakat yang ada berserta dengan hak tradisional yang dihargai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia(Warasih , 2017 ; 98).

Di masyarakat Bali sendiri mengenal adanya dua bentuk desa, yaitu Desa Dinas dan Desa Adat. Desa dinas didefinisikan sebagai sebuah kelompok masyarakat yang secara struktural dan teritorial berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah pusat. Sedangkan desa adat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang menjalankan aturan pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak ulayat) yang jelas batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (awig-awig) untuk warganya, memiliki kekayaan dan secara hirarkis tidak berada di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi. Konsep desa adat ini berawal dari penelitian L.A.Lie frinck di Bali utara (1886-1887) yang menyatakan desa di Bali sesungguhnya adalah sebuah republic kecil yang memiliki hukum atau aturan adat tersendiri. Penelitian ini kemudian diperkuat penelitian yang dilakukan V.E.Korn tentang studi hukum adat di Bali. Korn yang menghasilkan buku Het Adatrecht van Bali (1932) menyatakan desa-desa di Bali bersifat otonom. Dari sinilah muncul desa adat yang artinya desa yang memiliki adat atau hukum-hukum tradisi yang menjadi pedoman masyarakat (Wulansari Dewi, 2010 ; 24).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali dengan jelas mendefinisikan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan

tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Hak ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati negara seperti diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang (Parwata, 2013 ; 52).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali menyatakan setiap Desa Adat memiliki awig-awig, awig-awig adalah aturan yang di buat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, yang mengatur parahyangan, pawongan, dan pelemahan Desa Adat.. Setiap desa memiliki pararem,pararem adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat di Desa Adat. Tugas Desa adat adalah mewujudkan kasukretan desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala dan niskala, selain itu desa adat juga mempunyai tugas

mengembangkan perekonomian desa, salah satunya melalui lembaga keuangan milik desa adat yaitu Lembaga Perkreditan Desa.

Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan komunitas yang bersifat khas dan khusus pada komunitas masyarakat hukum adat di Bali dalam rangka penyelenggaraan politik negara dalam mengatur kesatuan masyarakat hukum adat secara tepat, sesuai dengan isi konstitusi negara. kekhasan dan khususnya penyelenggaraan Lembaga Perkreditan Desa yang syarat dengan adat di Bali dimana Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa dan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah merupakan sumber dari Hukum Adat., sebagaimana dikutip Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa Hukum Adat itu dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstraturory law*) meliputi peraturan - peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib,tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasahnya peraturan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Surojo, 1986 ; 23)

Mengingat semakin mendesaknya kebutuhan permodalan bagi masyarakat pedesaan, maka pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi bali mulai mengembangkan lembaga keuangan di lingkungan masyarakat pedesaan yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa. Dalam perkembangannya, sebagai upaya untuk lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan Lembaga Perkreditan

Desa sebagai suatu lembaga yang menjalankan fungsi keuangan milik desa pakraman dan krama desa yang menjadi anggotanya, dibentuklah Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang telah dirubah Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2012 dan dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 mengatakan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha, dan untuk itu desa-desa di Bali, khususnya di desa pakraman didirikan Lembaga Perkreditan Desa. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa ini sangat positif bagi perkembangan perekonomian desa. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang telah berkembang, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada masyarakat, sehingga kedepan perlu terus dibina, ditingkatkan kinerjanya, dan dilestarikan keberadaannya (Sumarta, 2014 ;78).

Dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa tidak dapat dipungkiri memang merupakan suatu kebutuhan mengingat akses untuk mendapatkan kredit melalui lembaga keuangan bank sangat terbatas. Untuk menunjang kelancaran pembangunan dan perekonomian di daerah pedesaan serta meningkatkan desa adat, maka kehadiran Lembaga Perkreditan Desa dapat memperkuat keuangan desa Adat, karena Lembaga Perkreditan Desa bergerak dalam simpan pinjam layaknya seperti perbankan. Kredit yang disalurkan oleh Lembaga Perkreditan Desa tidak selamanya berjalan dengan lancar karena

tidak jarang didalam pengembaliannya mengalami hambatan baik menjadi kredit yang bermasalah maupun menjadi kredit yang macet, Dalam pengembangan Lembaga Perkreditan Desa memerlukan peranan Hukum Adat berupa awig-awig yang berisikan sanksi Adat terhadap yang melanggar awig-awig Desa Adat yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa.

Desa Adat Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten buleleng dengan adanya Awig-awig desa adat yang berkaiatan dengan Lembaga Perkreditan Desa dalam membantu proses permasalahan Lembaga Perkreditan Desa Adat Telaga. Dengan salah satu kasus hasil muasyawah tanggal 23 mei 2019 jam 17.00 wita di rumah I ketut Sudiasa tentang pinjaman dan jaminan yang di cantumkan dalam surat perjanjian Kredit No: 3357/SPK/LPD.T/V/2017 tanggal 30 mei 2017 atas nama I Ketut Sudiasa dan No: 3458/SPk/LPD.T/IX/2017 tanggal 19 september 2017 atas nama Ni Luh Seniasih dengan jumlah hutang keseluruhannya Rp.372.339.413,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tuga puluh Sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah). Oleh karena tidak memenuhi kewajiban maka di putusan : Jaminan kebun An I ketut Sukrata, luas 17.600 m2, diambil alih untuk dikuasai oleh desa Adat. Jaminan kebun yang di kuasai oleh desa Adat di usahakan dijual dan hasilnya untuk melunasi hutang di Lembaga Perkreditan Desa desa Adat Telaga. Hasil penjualan tersebut apabila lebih dari hutang yang bersangkutan sisanya akan dikembalikan dan apabila kurang kami dari desa pakraman telaga tidak akan menuntut lagi. Selama kebun tersebut belum terjual hasil

dari kebut tersebut dikuasai oleh Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga. Setelah penyerahan jaminan/ di rampag segala hak-hak selaku desa Adat dipulihkan kembali. Surat perampagan ini dilaksanakan sudah sesuai awig-awig desa Adat Telaga dan surat perjanjian kredit yang dibuat oleh yang bersangkutan. Dalam hal perampagan atau penyerahan alih jaminan sering kali mendapat hambatan-hambatan dalam proses penyitaan jaminan kebun An I ketut Sukrata 17.600 m² dan juga dalam proses penjualan jaminan. didalam Awig-awig Desa Adat Telaga Tentang Lembaga Perkreditan Desa dinyatakan ,jika dalam enam bulan masih belum mampu membayar bunga dan pokok akan dilakukan penyitaan jaminan yang dikenal dengan istilah perampagan, sedangkan dalam proses penyitaan jaminan kebun An I Ketut Sukrata membutuhkan waktu satu tahun enam bulan untuk melakukan penyitaan jaminan, belum termasuk kedalam proses penjualan jaminan. Hal ini sering terjadi sehingga menyebabkan kemacetan modal bagi Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Telaga

Seperti yang diketahui, awig-awig adalah aturan yang di buat oleh desa adat dan/atau banjar adat yang berlaku bagi krama desa adat, yang mengatur parahyangan, pawongan, dan pelemahan Desa Adat. Dalam Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali Pasal 61 ayat (2) Lembaga Perkreditan Desa diakui keberadaanya, di bentuk, diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat. Yang dapat diartikan Desa berhak membuat awig-awig dan pararem untuk perkembangan Lembaga

Perkreditan Desa yang berisikan sanksi adat sesuai dengan awig-awig yang dibuat. Hal ini menjadi penting karena Desa Adat memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada terkait perkembangan kemajuan Lembaga Perkreditan Desa.

Kajian studi, Peranan Desa Adat Dalam pengelolaan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (studi kasus di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng) sangat penting dilakukan mengingat peranan Lembaga Perkreditan Desa sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu Desa Adat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga dalam hal ini Desa Adat seharusnya mengatur dengan sangat signifikan hal-hal terkait dengan perkembangan dan kemajuan Lembaga Perkreditan Desa melalui awig-awig. Sehingga keberadaan dan keberlangsungan Lembaga Perkreditan Desa tetap berjalan untuk memajukan perekonomian Desa Adat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengarahkan focus kajian penelitian PERANAN DESA ADAT DALAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PERKREDITAN (LPD) DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI KASUS DI DESA TELAGA KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan dalam penelitian yang telah di ajukan penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Peranan Desa Adat Telaga dalam pengelolaan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
2. Adanya pelanggaran awig-awig dalam proses penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
3. Adanya tidak kesesuaian waktu pengambilan alih jaminan dengan waktu yang ada dalam awig – awig Desa Adat Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah ditemukan di atas, maka penulis melakukan pembatasan masalah tentang dan faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian waktu pengambilan alih jaminan yang ada dalam awig awig Desa Adat Telaga Dengan penerapannya dan efektifitas Awig-awig Desa Adat dalam menyelesaikan permasalahan yang di alami Lembaga

Pengkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa?
2. Bagaimana efektifitas Awig-awig Desa Adat Telaga dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana, atau data (informasi) apa yang akan diberi melalui penelitian ini Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Umum

Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan Hukum Adat di Bali tentang peranan Desa Adat dalam pengelolaan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peranan Desa Adat dalam Pengelolaan Pppengembangan Lembaga Perkreditan Desa dan factor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran awig-awig dalam penerapannya yang berkaitan dengan Lembaga Perkreditan Desa
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis efektifitas awig-awig terhadap penyelesaian permasalahan yang di alami Lembaga Perkreditan Desa

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai peranan Desa Adat dalam mengatur perkembangan Lembaga Perkreditan Desa, selain itu juga diharapkan menjadi refrensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum adat di Bali.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah dan Desa Adat

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan –kebijakan mengenai peraturan dan awig-awig terkait Lembaga Perkreditan Desa, diharapkan kedepanya permasalahan-permasalahan yang ada dalam Lembaga Perkreditan Desa

dapat di selesaikan sesuai peraturan dan awig awig yang berlaku di desa adat di Bali

b. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Dengan dilakunnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran mengenai peranan awig awig terkait pengembangan Lembaga Perkreditan Desa sehingga Lembaga Perkreditan Desa mencermati peraturan dan awig awig desa adat sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan masyarakat mengetahui dan memahami awig-awig Desa Adat tentang Lembaga Perkreditan Desa serta sebagai sarana pembangunan pemikiran tentang peranan awig-awig terhadap pengembangan lembaga Lembaga Perkreditan Desa.

d. Bagi Peneliti Sejenisnya

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bias membantu bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis seperti yang dilakukan penulis agar dapat memahami penelitian, mekanisme, dan mengetahui peranan Desa Adat dalam pengelolaan pengembangan Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.